

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor ekonomi sangat diandalkan dalam proses pembangunan nasional dan menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja pemerintah (Marheni, 2022). Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pembangunan ini harus melibatkan masyarakat sehingga pertumbuhan yang diantisipasi tidak terpusat melainkan merata dan mantap. Pentingnya suatu negara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pembangunan nasional (Ikhsanul Kahsanul Kahfi, 2021).

UMKM adalah kegiatan usaha berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kegiatan usaha dan pemerataan kesempatan kerja secara merata (Marsudi & Filiawati, 2022). Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, mereka berkontribusi secara signifikan terhadap ekspor dan perdagangan. Barang-barang yang diproduksi oleh UKM berkualitas tinggi. Ini karena keinginan mereka untuk bersaing di pasar. Meski beroperasi sebagai UMKM, mereka tetap mempertimbangkan kualitas dan kuantitas sebelum membuat produk. Kondisi persaingan pasar tidak dapat dihindari, sehingga mereka

harus bersaing satu sama lain bahkan dengan perusahaan besar untuk mendapatkan keuntungan pasar.

Kota Batam memiliki 81.486 UMKM dengan berbagai bidang usaha, seperti kuliner, kerajinan, fashion, dan lain-lain yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Namun dari sekian banyak usaha mikro yang ada, masih banyak yang belum terdaftar dan belum memiliki izin usaha. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, UMKM di Kota Batam sudah selayaknya mendapat kesempatan untuk mendapat dukungan, perlindungan, dan pengembangan sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, UMKM merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Informasi di bawah ini berkaitan dengan jumlah UMKM di kota Batam.

Tabel 1.1 Tabel Jumlah UMKM yang aktif Pada Tahun 2021-2022

No	Lokasi Koperasi Di Kota Batam	Jumlah Koperasi Aktif 2021	Jumlah Koperasi Aktif 2022
1	Kec. Batu Ampar	102	105
2	Kec. Belakang Padang	28	30
3	Kec. Bulang	31	35
4	Kec. Galang	29	30
5	Kec. Lubuk Baja	117	120
6	Kec. Nongsa	57	59
7	Kec. Sei Beduk	77	80
8	Kec. Sekupang	125	128
9	Kec. Bengkong	58	60
10	Kec. Batam Kota	116	118
11	Kec. Batu Aji	67	70
12	Kec. Sagulung	78	80
	Total	885	910

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2022

Berdasarkan data pada table tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2021 terdapat 885 koperasi yang beroperasi di Kota Batam, serta pada tahun 2022 terdapat 910 koperasi yang beroperasi. Perkembangan koperasi di Kota Batam mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, UMKM di Kota Batam seringkali menghadapi sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan untuk menjamin keberlangsungan dan pertumbuhannya. Di Kota Batam, akses modal yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM. Adanya industri besar di Kota Batam dapat menciptakan persaingan yang ketat bagi UMKM. Usaha kecil dan menengah UMKM terus menghadapi tantangan dalam memperoleh pinjaman atau modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan besar memiliki skala ekonomi, sumber daya yang lebih besar, dan jaringan yang lebih besar, sehingga sulit bagi usaha kecil dan menengah untuk bersaing. Untuk meningkatkan peluangnya, UMKM harus mengejar strategi pemasaran yang inovatif, diferensiasi produk, dan kolaborasi dengan perusahaan besar.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pelatihan, dan UMKM sendiri perlu berkolaborasi Sangat penting untuk meningkatkan akses ke pendanaan, pelatihan, dan pendidikan, untuk mendorong kolaborasi dengan perusahaan besar, dan untuk meningkatkan kualitas dan standar produk. Dalam upaya mendorong perkembangan dan kelangsungan hidup UMKM, pemerintah Indonesia menugaskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan program yang mendukung sektor tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan penting dalam

pemberdayaan UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan pendampingan, pemberian akses pembiayaan, pengembangan pasar, promosi produk, dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM, terbukti dengan adanya peraturan UMKM Kota Batam, peraturan daerah yang memberdayakan UMKM di Kota Batam. Beberapa peraturan daerah telah diterapkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam, antara lain Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan UMKM, berupaya meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing UMKM di Kota Batam dengan memberikan bantuan berupa pendampingan, pelatihan, akses pasar, dan permodalan usaha. Melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan, peraturan ini memperluas ketersediaan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dengan tarif dan persyaratan yang lebih wajar.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. Peraturan ini memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang sama terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Dengan adanya Perda yang memberdayakan UMKM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam.

Banyak penelitian membicarakan hal yang sama membahas tentang pemberdayaan UMKM adalah. Penelitian Elfina Chairunisa (2020), berjudul Peran Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Sektor Menengah. Penelitian tersebut mengkaji tentang peran Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dalam konteks pengembangan strategis sektor UKM. Pertumbuhan yang efektif untuk mendorong peningkatan jumlah UKM di Provinsi NTB, strategi pengembangan yang efektif untuk mendorong pengembangan kapasitas dan manajemen UKM di Provinsi NTB, dan strategi fasilitasi pengembangan UKM. Proteksi cukup efektif dalam memenuhi aspek legalitas, sertifikasi, standarisasi, dan permodalan bagi UKM di Provinsi NTB, serta strategi pola kemitraan dan jaringan usaha untuk memperluas akses pasar bagi UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian kedua oleh Siska Febrianti (2020), berjudul Strategi Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Sepanjang wabah Covid-19. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada masa Pandemi Covid-19, meliputi pengadaan pelatihan, pengadaan bimtek, pemasaran online, dan pendirian galeri. Pasang KUMKM. Dalam strategi ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan pendekatan berbasis integrasi dengan tujuan untuk mempercepat arus distribusi baik bahan baku maupun alat produksi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Christofer Ondang, Frans Singkoh, dan Neni Kumayas (2019), dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa menuju kemandiriannya. Penelitian ini mengkaji pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero, yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran teknis. Dalam penelitian ini Peneliti dapat mengetahui peran dan program dinas koperasi untuk pertumbuhan UMKM. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki temuan atau hasil yang baru dan berbeda, seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan usaha mikro atau mengidentifikasi metode yang lebih efisien untuk mengembangkan usaha mikro.

Dengan melakukan penelitian tentang **PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA BATAM**, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan fungsinya yaitu pemberdayaan UMKM. dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita mengenai peran Dinas koperasi dan usaha mikro di kota Batam.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks sebelumnya, **masalah** berikut telah diidentifikasi:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam masih mengalami keterbatasan pembiayaan yang memadai untuk pengembangan usaha.
2. Masih terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha, serta kendala dalam memasarkan produknya secara efektif.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti maka, peneliti memusatkan analisis tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha mikro dalam pemberdayaan UMKM di Kota Batam, yang berfokus pada peran pemberdayaan, kebijakan, dan program, untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing UMKM Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, maka, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan UMKM Kota Batam?

2. Kebijakan, program, dan layanan apa saja yang ditawarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam untuk mendukung dan memajukan UMKM?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan, program, dan layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung dan memajukan UMKM.
2. Untuk mengetahui kebijakan program pemberdayaan yang efektif oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk meningkatkan pengembangan UMKM dengan memberdayakan UMKM.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat tentang perkembangan UMKM, dengan mempertimbangkan program-program pemerintah terkini untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM. Ini akan berkontribusi pada pengembangan teori dan model analisis baru yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM dan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan UMKM.

- b. Diharapkan temuan studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang memberdayakan UMKM secara lebih efektif. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM dan merancang program untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan bantuan yang diperlukan.